

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan bank sangat penting dalam kegiatan dunia usaha, bank menjadi alat intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang berlebih dana untuk menjalankan fungsi usahanya. Keterkaitan antara dunia usaha dengan lembaga keuangan bank memang tidak bisa dilepaskan, terlebih dalam pengertian investasi dan kredit. Pihak bank akan menyalurkan kredit berupa kredit investasi atau modal kerja yang dibutuhkan oleh pihak dunia usaha. Dalam hal inilah pihak bank terus mengembangkan kompetensi yang lain di bidang kredit untuk menggalang pertumbuhan kredit yang berkesinambungan sekaligus menjalankan fungsinya sebagai jasa intermediasi keuangan.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 10, Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditor) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana atau debitor). Pihak-pihak yang kelebihan dana, baik perseorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintah dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan, ataupun deposito

berjangka sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya (Suseno dan Piter A. 2003:6)

Sementara itu pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi.

Sumber utama pembiayaan investasi di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan, namun lambatnya penyaluran kredit perbankan di Indonesia setelah krisis dituding sebagai salah satu penyebab lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Kredit Investasi di Indonesia**  
**(Miliar/Tahun)**

Tahun	Kredit Investasi (miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1996	50.8255	76,68
1997	53.2874	4,84
1998	65.8521	23,57
1999	29.2476	-55,58
2000	25.4546	-12,96
2001	38.0575	49,51
2002	54.5326	43,29
2003	69.1722	26,84
2004	75.2111	8,73

Sumber : Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia Bank Indonesia (1995-2005)

Penurunan pertumbuhan kredit investasi yang disalurkan bank umum terlihat pada tahun 1999. pada tahun 1998 kredit investasi sebesar 65.8521 miliar/tahun, dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 1999 mengalami penurunan sebesar 55.58% menjadi 29.2476 miliar/tahun. Salah satunya faktor penyebabnya adalah karena pemulihan perekonomian setelah krisis yang melanda Indonesia belum sepenuhnya pulih. Dari data tersebut diatas mencerminkan perputaran dana di sektor perbankan belum dapat mencukupi sebagai sumber pembiayaan investasi dan produksi bagi

sektor riil padahal aliran dana yang ditujukan untuk membiayai kegiatan investasi dan produksi merupakan penyangga utama perekonomian suatu negara.

Tahun 2004 sudah ada tanda-tanda positif kenaikan investasi sebesar (75.2111 miliar/tahun) namun pertumbuhannya belum cukup untuk mengembalikan kinerja zaman sebelum krisis. Akan tetapi, kebanyakan investasi yang masuk ditujukan ke sektor-sektor konsumtif. Seharusnya lebih dititikberatkan pada pembiayaan investasi dan produksi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung.

Laporan Bank Indonesia menunjukkan bahwa belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan antara lain disebabkan oleh masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan dan belum mampunya sektor riil menyerap kredit. Dalam kondisi resesi ekonomi setelah krisis, penurunan kredit terutama disebabkan adanya fenomena "credit crunch" yaitu dana berlimpah tetapi tidak mengalir ke sektor riil, yang maksudnya adalah walaupun permintaan kredit oleh sektor riil meningkat, seiring mulai berjalannya perekonomian, tetapi sektor perbankan masih enggan menyalurkan dananya kepada sektor ini (Info Bank, Des 2004) karena melihat pengalaman buruk di masa lalu dimana banyak korporat kelas kakap yang belum melunasi utangnya dan sampai saat ini hanya membayar bunganya saja, sehingga utang makin menumpuk, selain itu terjadi juga karena melemahnya permintaan kredit dari sektor usaha akibat rendahnya prospek investasi dan belum pulihnya kondisi keuangan perusahaan.

Pemanfaatan sumber dana yang kurang optimal dari kelompok bank yang dimiliki pihak asing, rasio kredit yang tersalur hanya sedikit untuk investasi. Selama ini, sektor korporat dan infrastruktur, termasuk kredit investasinya, masih didominasi kelompok bank BUMN sedangkan kelompok bank swasta (asing dan



campuran) cenderung memfokuskan diri pada kredit konsumsi, padahal pada umumnya kredit konsumsi bukan merupakan kredit yang tergolong produktif dan pemberian kredit kepada sektor-sektor non produktif oleh bank jelas tidak sejalan dengan tujuan pemberian kesempatan kepada bank untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional karena tidak adanya keuntungan yang dipetik pemerintah dalam bentuk tambahan kemampuan penyediaan kredit dari industri perbankan untuk pembangunan perekonomian Indonesia.

Investasi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang meningkatkan kemampuan ekonomi untuk memproduksi output di masa yang akan datang dan hal itu sangat mempengaruhi sumbangan sektor perbankan terhadap pembangunan ekonomi yang dapat dilihat besarnya sumbangan pada PDB (Produk Domestik Bruto) dan hal itu dapat menunjukkan bahwa bank mempunyai sumbangan yang cukup berarti bagi pertumbuhan PDB di Indonesia salah satunya melalui penyaluran kredit investasinya.

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)**  
**(Miliar/Tahun)**

Tahun	PDB	Pertumbuhan (%)
1996	1483627	7,89
1997	1547266	4,28
1998	1353223	-12,54
1999	1364093	0,80
2000	1432598	5,02
2001	1479182	3,25

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia (1995-2002)

Perkembangan Produk Domestik Bruto pada tahun 1996 sampai dengan 2001 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan PDB sempat mengalami pertumbuhan yang negatif yang terjadi pada tahun 1998 sebesar 12,54%, sedangkan pada tahun 1999 PDB mulai mengalami kenaikan sebesar 0.80% menjadi (1364093 miliar/tahun).

Pada umumnya, perkembangan PDB ini terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam prakteknya, hal tersebut akan banyak bergantung pada realisasi jumlah investasi, yang sebagian besar datang dari sektor swasta. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan cenderung berfluktuatif seiring dengan peningkatan dan penurunan yang terjadi pada kinerja sektor investasi, dan fluktuasi kinerja tersebut akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan PDB, begitu pula sebaliknya.

**Tabel 1.3**  
**Pertumbuhan Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Kredit di Indonesia**  
**(Persen/Tahun)**

Tahun	Tingkat Inflasi (%)	Suku Bunga Kredit (%)
1996	6.47	16.53
1997	11.05	16.24
1998	77.63	23.16
1999	20.01	22.93
2000	9.35	24.98
2001	12.55	15.97

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia (1995-2002)

Gejolak suku bunga dan inflasi menjadi dua faktor penting yang mempengaruhi aktivitas penyaluran kredit investasi di Indonesia. Tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 1998 sangat tinggi mencapai (77.63%) yang pada tahun sebelumnya tingkat inflasi hanya (11.05%) ini diakibatkan krisis yang melanda Indonesia sehingga

menaikan tingkat inflasi. Namun pada tahun 2000 tingkat inflasi sempat rendah (9.35%) dari tahun-tahun sebelumnya, semakin membaiknya perekonomian pasca krisis juga ditandai dengan investasi yang mulai naik. Suku bunga kredit juga sempat mengalami kenaikan pada tahun 1998 namun pada tahun berikutnya suku bunga kredit mulai turun kembali. Penurunan suku bunga perbankan khususnya suku bunga kredit dan tingkat inflasi merupakan salah satu faktor untuk mendorong tumbuhnya investasi.

Atas dasar pemikiran dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai Kredit Investasi di Indonesia, penulis mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT, PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP KREDIT INVESTASI BANK UMUM DI INDONESIA TAHUN 1985 -2005”**

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu, dana dan kemampuan penulis maka dalam penulisan skripsi hanya dibatasi pada :

1. Dalam penelitian ini hanya dibahas tiga variabel yang mempengaruhi kredit investasi bank umum yaitu suku bunga kredit, PDB dan inflasi.
2. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data tahunan sejak tahun

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat Suku Bunga Kredit, Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat Inflasi berpengaruh signifikan terhadap kredit Investasi bank umum di Indonesia.
2. Dari ketiga variabel yaitu tingkat Suku Bunga Kredit, Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat Inflasi manakah variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Kredit Investasi bank umum di Indonesia.

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat Suku Bunga Kredit, Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat Inflasi terhadap kredit Investasi bank umum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap Kredit Investasi bank umum di Indonesia.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat :

1. Dapat memberikan tambahan informasi mengenai kredit investasi bank umum di Indonesia.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya yang akan mengkaji pengaruh dari tingkat Suku Bunga Kredit, Produk Domestik Bruto (PDB), dan Inflasi terhadap Kredit Investasi bank umum di Indonesia atau berupa pengembangan dari penelitian ini.



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Furthermore, it is noted that the records should be kept in a secure and accessible format. Regular backups are recommended to prevent data loss in the event of a system failure or disaster.

The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies. It states that any differences between the recorded amounts and the actual cash flow should be investigated immediately. This involves reviewing the relevant receipts and invoices to identify the source of the error.

Once the discrepancy has been identified, the appropriate corrective action should be taken. This may involve adjusting the records or contacting the relevant party to resolve the issue.

It is also important to ensure that all records are kept up-to-date. Any new transactions should be recorded as soon as they occur. This helps to maintain the accuracy of the overall financial picture.

Additionally, the document highlights the need for clear communication between all parties involved. Regular meetings and reports should be used to discuss the financial status and any potential issues.

The final part of the document provides a summary of the key points discussed. It reiterates the importance of accuracy, security, and transparency in financial record-keeping.

In conclusion, maintaining accurate and up-to-date records is essential for the success of any business. By following the guidelines outlined in this document, you can ensure that your financial data is reliable and easy to manage.

The following table provides a summary of the key points discussed in the document:

Point	Description
1	Accuracy: All transactions must be recorded accurately and supported by valid receipts or invoices.
2	Security: Records should be kept in a secure and accessible format, with regular backups.
3	Transparency: Discrepancies should be investigated immediately and resolved.
4	Up-to-date: Records should be kept up-to-date with all new transactions.
5	Communication: Regular communication between all parties is essential for maintaining accurate records.

By following these guidelines, you can ensure that your financial records are accurate, secure, and transparent.